



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAPPEBTI

News Title : Waspada Kejahatan Aset Kripto, Bappebti Blokir 1.726 Entitas Illegal, Begini Modusnya!

Media Name : viva.co.id

Journalist : Zahrul Darmawan

Publish Date : 06 December 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Entertainment

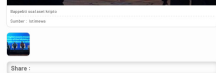
Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Illegal

Waspada Kejahatan Aset Kripto, Bappebti Blokir 1.726 Entitas Illegal, Begini Modusnya!

Waspada Kejahatan Aset Kripto, Bappebti Blokir 1.726 Entitas Illegal, Begini Modusnya!

06 Desember 2023, 10:01 WIB

Ditulis: Zahrul Darmawan



Slap - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, hingga Oktober 2023 telah transaksi aset kripto di Indonesia tumbuh dengan volume Rp 26,91 triliun.

Namun demikian, angka ini turun 62,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 (yoy). Adapun jumlah pelanggan aset kripto terdaftar per Oktober 2023 ada sebanyak 18,02 juta pelanggan.

Selain itu, **Kasan** juga menilai perkembangan aset kripto saat ini masih cukup optimis melihat perkembangan teknologi, masyarakat yang telah mandiri dengan berinvestasi di aset kripto, dan kontrak berjangka komoditi. Bappebti mencatat, hingga Oktober 2023 telah transaksi aset kripto di Indonesia tumbuh dengan volume Rp 26,91 triliun.

Terlebih, didukung oleh hasil studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen Celcus pada September 2022, yang menyebutkan bahwa aset kripto memiliki nilai dan likuiditas rekayasa dan saham sebagai aset yang paling banyak dibeli oleh investor ritel.

Terkait hal itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap praktik di bidang PBK secara global.

Undang-Undang itu antara lain mengatur pengertian komoditi, perdagangan berjangka komoditi, dan kontrak derivatif lainnya.

Komoditi, praktik perdagangan berjangka di luar bursa, seperti perdagangan praktik kegiatan promosi, rekutimen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti (illegal).

Selain itu, demutasi bursa berjangka, asosiasi industri perdagangan berjangka, dan transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik.

Menurut Kasan, dengan perkembangan teknologi, masyarakat yang telah mandiri dengan berinvestasi di aset kripto, dan kontrak berjangka komoditi. Bappebti mencatat, hingga Oktober 2023 telah transaksi aset kripto di Indonesia tumbuh dengan volume Rp 26,91 triliun.

Saat ini banyak masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan penghijauan dan masyarakat berkehadapan aset kripto melalui penawaran paket investasi menggunakan robot trading.

"Kegiatan tersebut terjadi karena perusahaan penyedia robot trading membawa kabar (scam) dan milik anggotanya," jelas dia.

Masih kata Kasan, kegiatan tersebut terindikasi menggunakan skema ponzi (piramida), dimana modal dari investor tersebut adalah membayarkan keuntungan kepada para anggota dari dirinya sendiri dan dana dari anggota baru yang berhasil direkrutnya.

Kasan mengungkapkan, Bappebti yang merupakan salah satu unit Eselon II Kementerian Perdagangan, tugasnya melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perdagangan berjangka.

Bappebti juga bertugas melaksanakan sistem risi quatum dan pasar lelang komoditas.

"Termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi adalah aset kripto," terangnya.

Kasan juga mengatakan, salah satu komoditas yang diawasi adalah Bappebti sesuai dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya.

Termasuk setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya.

Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit berbasis distributed ledger technology.

"Ibu berupa aset kripto virtual (utility crypto) atau aset kripto beragun aset (Crypto Backed Asset) dan telah melalui hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti," jelas Kasan.

Adapun ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia terdiri dari pedagang aset kripto, bursa berjangka aset kripto, lembaga kliring, dan pengolah tempat penyimpanan aset kripto.

"Saat ini pemerintah (Bappebti) telah membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari bursa berjangka aset kripto (PT Bursa Komoditi Nusantara), lembaga kliring (PT Kliring Berjangka Indonesia).

Lalu, pengolah tempat penyimpanan aset kripto (PT Tontok Depository Indonesia).

Untuk melindungi investor kripto di Indonesia, Bappebti melakukan pengawasan berbasis risiko atau Risk Based Supervision (RBS) yang dilakukan melalui pengawasan secara on-site (on-site supervision).

Selain itu juga melakukan pengawasan secara langsung (off-site supervision) serta kegiatan evaluasi dan monitoring (evaluation and monitoring).

"Langkah lainnya yang telah dilakukan dalam melindungi investor di Indonesia adalah terus memperkuat regulasi yang dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dan berkelanjutan bersama asosiasi, pelaku usaha dan Kementerian atau lembaga terkait lainnya."

Selain itu, Kamendang melalui Bappebti mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai upaya untuk mengawasi dan melindungi masyarakat serta melindungi nilai usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha dengan beragran regulasi.

Untuk perusahaan trading yang tidak berizin atau ilegal Bappebti telah melakukan pemblokiran beberapa domain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemblokiran dalam bentuk siaran pers melalui website www.bappebti.go.id.

Sekarang tahun 2018 Bappebti telah memblokir 6.236 domain situs web entitas PBK ilegal.

Dimensi sepanjang tahun 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 Bappebti telah melakukan pemblokiran 1.726 entitas ilegal.

Agar masyarakat bisa berinvestasi secara aman dan legal pemerintah serta pelaku usaha aset kripto melakukan edukasi secara terus menerus dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, X) dan media lainnya.

"Sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia."